

KEHADIRAN NEGARA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA DISANKSIKAN DAPAT BERSAING DALAM ASEAN COMMUNITY

Oleh: **Budiharjo¹** dan **Herry Rachmatsyah²** dan **Endang Sulastri**

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I
No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Jakarta 15419, Indonesia

Email: 54budiharjo@gmail.com¹; therryrachmatsyah@gmail.com² dan endangsulastri@umj.ac.id³

Abstract

Establishment of the ASEAN Community will make every ASEAN countries will be involved in the global market . Education is a sector that is very important and strategic to improve the development of human resources in the face of the global market . In the ASEAN Community will occur free labor market in 2015 . Indonesia faced in education reform to produce competitive human resources at the regional level . The role of a strong state is needed to make Indonesia to compete in the ASEAN Community .

Keywords: ASEAN Community, Education, Challenges, Opportunities

A. Pendahuluan

Para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 sepakat untuk membentuk sebuah Komunitas ASEAN. Komitmen untuk membentuk sebuah komunitas ASEAN ini dipertegas kembali dalam ASEAN *Summit* ke-12 pada tahun 2007 dan hasilnya untuk membentuk Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga

pilar, yaitu ASEAN *Political-Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC). Komunitas ASEAN ini dapat tercapai apabila negara anggota ASEAN tidak hanya berfokus pada kepentingan domestik mereka sendiri tetapi juga memberikan perhatian kepada pembangunan di tingkat regional. Dengan adanya Komunitas ASEAN 2015, maka negara anggota ASEAN mulai memberikan penekanan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang merupakan kunci dalam pembangunan bangsa untuk memasuki ekonomi yang berbasis pada pengetahuan dan lingkungan global.

Terbentuknya ASEAN *Community* akan membuat setiap negara ASEAN akan masuk dalam sebuah lingkungan yang dinamakan pasar global. Dalam pasar global pentingnya pengetahuan dan informasi teknologi sebagai pendorong utama dalam pembangunan. Pendidikan yang merupakan salah satu dasar hak asasi manusia, dianggap sangat strategis untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dalam

menghadapi pasar global. Hak untuk memperoleh pendidikan memberikan kewajiban kepada negara-negara untuk memastikan bahwa semua anak-anak dan warga negaranya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara merata. Dalam hal ini negara-negara ASEAN berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan ekuitas bidang pendidikan. Kewajiban ini menjadi kebijakan umum yang harus dilakukan negara-negara di Asia Tenggara terlepas dari tingkat pembangunan yang berbeda satu sama lain.

B. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Fenomena yang akan dianalisis adalah proses kegiatan pendidikan di kawasan ASEAN berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya.

C. Pembahasan

1. Pentingnya Sektor Pendidikan Dalam Asean

Pentingnya kerjasama pendidikan di ASEAN diamanatkan dalam Deklarasi ASEAN, Visi ASEAN 2020 dan Piagam ASEAN. Ketiga landasan tersebut menyerukan kepada negara-negara ASEAN untuk hidup dalam kemakmuran, perdamaian dan stabilitas, serta terikat bersama dalam kemitraan dan pembangunan yang dinamis. Di samping itu, Piagam ASEAN juga menetapkan bahwa salah satu tujuan dari ASEAN adalah “untuk mengembangkan sumber

daya manusia melalui kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran, serta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan masyarakat ASEAN dan untuk penguatan Komunitas ASEAN”.

Sektor pendidikan menjadi penting bagi komitmen ASEAN untuk membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan oleh para pemimpin negara ASEAN. Dalam Deklarasi *Cha-Am Hua Hin* tentang *Strengthening Cooperation on Education to Achieve An ASEAN Caring and Sharing Community* yang diadopsi pada tanggal 24 Oktober 2009 menyatakan bahwa ini sektor pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan Komunitas ASEAN. Dengan meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan maka setiap negara telah melakukan tanggung jawab sosial, di mana negara akan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Pendidikan juga diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing masing-masing negara Anggota ASEAN.¹

Dalam hal pembangunan Pendidikan Tinggi di ASEAN, tujuan strategis yang lebih luas ingin dicapai adalah untuk menjamin integrasi pendidikan dalam pembangunan ASEAN. Pembangunan di sektor pendidikan bertujuan untuk memajukan dan memprioritaskan pendidikan yang fokus pada: 1) menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan; 2) mencapai akses universal untuk pendidikan dasar; 3) mendorong kepedulian dan pembangunan anak usia dini; dan 4) meningkatkan kesadaran pemuda ASEAN melalui pendidikan dan kegiatan untuk membangun identitas ASEAN berdasarkan persahabatan dan kerjasama.

Beberapa tantangan pendidikan tinggi di Asia Tenggara adalah: 1) kurangnya staf pengajar yang

1 The ASEAN Secretariat, ASEAN 5-YEAR WORK PLAN ON EDUCATION (2011–2015), Oktober 2012

2 Mohammad Naim Yaakub, “CHALLENGES IN EDUCATION TOWARDS THE REALIZATION OF ASEAN COMMUNITY 2015” diakses dari <http://www.site.rmutt.ac.th/cpscworkshop/materials/sp.pdf> pada tanggal 10 Februari 2015 pkl. 09.00

3 Ibid.

berkualitas, 2) pengalaman dan kualitas proses penjaminan mutu pendidikan yang terbatas, 3) kurangnya akses pendidikan yang merata bagi para siswa, 4) kurangnya infrastruktur pendidikan, penyebaran geografis dan keragaman universitas, serta 5) fasilitas penggunaan bahasa Inggris dan keahlian penelitian yang terbatas².

Dalam Komunitas ASEAN akan terjadi pasar bebas tenaga kerja pada tahun 2015 dan pendidikan tinggi di kawasan harus diperkuat dengan strategi untuk dapat mengatasi tantangan tersebut di atas. Strategi yang dilakukan adalah³:

- *Regional Accreditation* (APACC) yang bertujuan untuk mengakreditasi dan sertifikasi lembaga *technical and vocational education and training* (TVET) melalui kerangka kualitas umum yang akan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja di kawasan tersebut.
- Kerangka Pendidikan terpadu, dengan menetapkan standar kurikulum lembaga pendidikan tinggi ASEAN. Konsekuensinya setiap negara ASEAN harus merevisi kurikulum di semua program untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Saat ini negara-negara di Asia dihadapkan dengan permasalahan kurangnya tenaga kerja terampil, baik laki-laki maupun wanita.
- *Scholarship for students/Faculty Exchange*. Bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang muda ASEAN dalam mengembangkan potensi mereka dan membekali mereka dengan keterampilan yang akan memungkinkan mereka untuk percaya diri melangkah ke komunitas yang lebih besar.

- *Regional Skills Competition*. Kompetisi ini akan mendorong partisipasi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga TVET untuk mendukung pengembangan tenaga kerja dan mencapai standar kompetensi regional.
- Meningkatkan Penggunaan Bahasa Inggris. Para pekerja harus menyadari pentingnya memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- *E-learning/* pembelajaran online/ *Distance Learning/ Open Learning*. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara perlu meningkatkan jumlah universitas terbuka. Sistem pembelajaran terbuka tidak hanya untuk tingkat universitas dan TVET, tetapi juga untuk program pelatihan guru.
- Pendidikan Universal (akses, pemerataan dan kualitas). Tidak semua negara ASEAN mampu menyediakan pendidikan gratis seperti Brunei Darussalam, yang memberikan pendidikan gratis untuk semua warga negara dari usia lima sampai tingkat universitas.

Terdapat beberapa point penting di sektor pendidikan yang akan diwujudkan dalam *ASEAN Community*, yaitu ⁴: 1) Mengembangkan *national skills framework* menuju kerangka kerja keterampilan ASEAN; 2) Mendorong mobilitas yang lebih besar dari para pelajar; 3) Dukungan mobilitas yang lebih besar bagi pekerja terampil melalui mekanisme kerja sama regional dan dengan upaya untuk menjaga dan meningkatkan standar pendidikan dan profesional; 4) Mengembangkan pekerjaan yang berbasis standar kompetensi ASEAN; dan 5) Mendorong pengembangan standar kompetensi umum sebagai dasar untuk *benchmarking* dalam rangka

4 ASEAN Secretariat, "ASEAN Integration by 2015 and Its Implications to Education in the Region", diakses dari http://seamolec.org/cnx/03/A_ASEAN/28Jan13_ASEC_ASEAN%20Integration%20and%20implication%20to%20Southeast%20Asia.pdf pada tanggal 10 Februari 2015 pkl. 13.00

5 Nancy Huyen Nguyen, "THAI WORKFORCE- READY FOR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015?", diakses dari http://utcc2.utcc.ac.th/utccijbe/_uploads/InProcess/201409/THAI%20WORKFORCE-%20READY%20FOR%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf pada tanggal 11 Februari 2015 pkl. 11.00

mendorong pengakuan kompetensi antar negara ASEAN.

2. Sektor Pendidikan di Beberapa Negara Asean Menuju Asean *Community* 2015

Dalam rangka menuju ASEAN *Community* 2015, beberapa negara ASEAN telah merancang beberapa kebijakan pendidikan. Seperti misalnya di Thailand⁵, tingkat pendidikan tenaga kerja di Thailand secara terus-menerus ditingkatkan. Pemerintah Thailand secara aktif bekerja untuk meningkatkan pendidikan di Thailand sejak adanya Skema Pembangunan Pendidikan Nasional pada tahun 1932. Skema ini bertujuan untuk mendorong penciptaan ekonomi yang berbasis pengetahuan, dengan fokus pada inovasi dalam sektor teknologi. Sejak tahun 2002, Thailand telah berhasil menciptakan pendidikan wajib yang mengharuskan warga Thailand untuk mencapai setidaknya 9 tahun wajib belajar di bawah dukungan pemerintah. Selain itu, pendidikan tinggi dapat dengan mudah diakses dengan adanya dana pinjaman kepada mahasiswa pada tahun 1996. Baru-baru ini, pemerintah Thailand telah merumuskan Rencana Nasional Pembangunan Ekonomi dan Sosial Kesebelas (2012-2016) dengan menempatkan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil. Dalam sepuluh tahun terakhir, Departemen Ilmu dan Teknologi menyediakan lebih dari 3.000 beasiswa ilmu pengetahuan dan teknologi, dari sarjana sampai dengan studi doktor. Sejumlah program juga telah dilaksanakan untuk mengembangkan teknisi yang berkualitas melalui sekolah-sekolah berbasis ilmu pengetahuan teknologi, program

kerja pembelajaran terpadu, kerja sama sistem pendidikan di perguruan tinggi, serta program pendidikan melalui Sekolah Ilmu. Upaya yang dilakukan oleh negara ini telah berhasil meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi ke pasar tenaga kerja nasional. Tingkat pertumbuhan rata-rata tenaga kerja dengan tingkat gelar Master semakin meningkat. Pada tahun 2012, persentase karyawan yang memegang gelar tinggi dalam angkatan kerja Thailand meningkat menjadi hampir 18 persen.

Di samping itu, di Thailand⁶, Departemen Kebudayaan juga sedang mempertimbangkan untuk mendirikan divisi ASEAN untuk menangani urusan budaya antara Thailand dan anggota ASEAN lainnya. Departemen Pendidikan juga meningkatkan pendidikan kejuruan dalam rangka persiapan realisasi Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Departemen Pendidikan memiliki kebijakan memberikan dorongan besar untuk pendidikan kejuruan dalam rangka meningkatkan daya saing Thailand dalam empat tahun ke depan. Pengembangan keterampilan akan membantu mengembangkan sumber daya manusia, sehingga memungkinkan pekerja Thailand untuk tetap kompetitif di pasar global.

Sementara di Filipina menetapkan kebijakan *The Philippine Education for All* (PUS) 2015⁷. Ini adalah visi dan program reformasi holistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar bagi setiap warga negara Filipina pada tahun 2015. Program ini dimunculkan pada bulan April 2000 di Dakar, Senegal, dan diadopsi oleh berbagai negara yang berpartisipasi termasuk Filipina. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kompetensi dasar bagi semua

6 "Thailand to Focus More on Culture and Education toward Realizing the ASEAN Community", diakses dari http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=5547&a=3 pada tanggal 10 Februari 2015 pkL 15.00

7 Gilbert T. Sadsad, "ENHANCING QUALITY EDUCATION THRU THE K+12 PROGRAM TOWARDS THE REALIZATION OF ASEAN COMMUNITY 2015 THE PHILIPPINES COUNTRY REPORT" diakses dari <http://www.ppsta.net/forms/2014/others/PHILIPPINES%20COUNTRY%20REPORT.pdf> pada tanggal 10 Februari 2015 pkL 15.20.

orang dalam rangka untuk mencapai keaksaraan fungsional untuk semua. Program ini memastikan bahwa setiap warga negara Filipina akan memiliki kompetensi dasar setara dengan menyediakan kebutuhan pendidikan dasar.

Sementara pendidikan di Kamboja masih tertinggal apabila dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja hal ini merupakan kendala utama dalam memanfaatkan peluang AEC. Negara ini memiliki tingkat melek huruf terendah di dunia (73,9 persen pada tahun 2012), dan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah di ASEAN. Selain itu, pasar tenaga kerja di negara ini ditandai dengan ketidaksesuaian dan kesenjangan keterampilan yang disebabkan karena kurangnya motivasi, serta pendidikan dan pelatihan yang tidak cukup baik. Pada pergerakan tenaga kerja, Kamboja merupakan eksportir tenaga kerja, tetapi kebanyakan adalah pekerja dengan yang memiliki keterampilan yang rendah yang mencari pekerjaan tanpa dokumen yang sah dan tidak tercakup dalam aliran bebas tenaga kerja dalam AEC. Buruh migran Kamboja rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kamboja mendapatkan keuntungan dari AEC karena dengan adanya AEC maka Kamboja dapat mengimpor tenaga kerja terampil dari negara-negara ASEAN.⁸

Dengan adanya AEC, akan mendorong negara-negara ASEAN untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi dan lebih produktif sehingga dapat berkompetisi di pasar regional. Dengan upaya ini, maka akan menjadikan negara tersebut tidak bergantung pada tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah untuk

mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Menyadari peluang tersebut maka dibutuhkan penguatan pendidikan nasional dan sistem pelatihan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kualifikasi dan kompetensi diperlukan untuk bersaing di ASEAN⁹.

Terlepas pentingnya pembangunan di bidang sumber daya manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar, kemampuan melek huruf dan berhitung. Dalam hal ini negara-negara anggota ASEAN berada dalam posisi yang cukup kuat. Tingkat melek huruf cukup tinggi di antara populasi usia kerja – kecuali di Kamboja dan Laos di mana tingkat melek huruf kurang dari 75 persen. Negara-negara Anggota ASEAN telah mencapai pendidikan universal dalam hal pendidikan dasar. Namun di kawasan secara keseluruhan hampir tiga juta anak usia sekolah dasar tidak sekolah. Hal disebabkan karena mereka tidak pernah terdaftar. Mereka berisiko menjadi tenaga kerja anak dan tidak mungkin untuk memperoleh literasi dan keterampilan yang layak yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Lebih dari 80 persen dari anak-anak ini berada di Indonesia dan Filipina. Filipina juga memiliki proporsi tertinggi untuk anak-anak keluar dari sekolah. Permasalahan tentang anak-anak yang keluar dari sekolah juga terjadi di Brunei Darussalam, Laos dan Thailand.

Defisit pendidikan menengah terbesar berada di Kamboja, Laos dan Myanmar, di mana angka partisipasi murni kurang dari 50 persen. Di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand partisipasi dalam pendidikan menengah lebih tinggi tapi masih tidak universal. Partisipasi pendidikan kejuruan juga lemah di sebagian besar

8 Hing Vutha, "Cambodia's Preparedness for ASEAN Economic Community 2015 and Beyond", dalam *Development Research Forum Synthesis Report* No. 07, September 2014

9 International Labour Organization and Asian Development Bank, "ASEAN community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity", Bangkok, 2014

10 *Ibid.*

negara anggota ASEAN, khususnya di kalangan wanita muda. Dalam hal ini, Viet Nam telah mulai meningkatkan pendidikan bagi etnis minoritas dan gadis di daerah tertinggal dengan membangun sekolah dan perumahan guru, pengembangan ruang kelas, program pemberian makanan di sekolah. Demikian juga, Indonesia mendorong partisipasi untuk anak perempuan di daerah pedesaan miskin melalui hibah yang dikelola oleh komite sekolah yang disediakan seperti beasiswa, pemberian makanan tambahan, bantuan transportasi dan fasilitas sanitasi yang terpisah¹⁰.

Negara ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menengah dan tinggi juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan lulusan perguruan tinggi dengan ijazah di bidang teknik, manufaktur dan konstruksi yang rendah - di 9,3 persen di Brunei Darussalam, 15,6 persen di Thailand dan 27,3 persen di Malaysia - dan secara signifikan lebih rendah bagi perempuan. Thailand, misalnya, memiliki kelebihan pasokan lulusan ilmu sosial dan terlalu sedikit spesialis di ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan. Akibatnya sekitar 80 persen perusahaan di Thailand mengalami kesulitan dalam mengisi lowongan pekerjaan karena sebagian besar lulusan tidak memiliki keterampilan teknis terkait.

Meskipun di tingkat makro dan mikro terdapat sejumlah tantangan yang sangat beragam di semua negara ASEAN, *the ASEAN Secretariat's five-year Work Plan on Education* mencoba mengatasi tantangan ini melalui akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mobilitas lintas batas dan internasionalisasi pendidikan, serta dukungan terhadap sektoral lainnya yang membutuhkan input program pendidikan. Tantangan makro dapat dilihat dari masih terdapatnya kejahatan

“korupsi dan politik”, Sebuah pertanyaan kunci adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan dan mengatasi tantangan sosial-politik, sosio-kultural dan sosio-ekonomi-nya. Tentu saja hal ini akan membutuhkan peran yang optimal dari lembaga pendidikan tinggi. AEC 2015 akan memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan tinggi lokal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan mereka untuk bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional. Setiap negara ASEAN dapat membawa reformasi pendidikan di tingkat makro melalui¹¹:

- Meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas pendidikan tinggi dalam arena pendidikan regional untuk lebih kompetitif dan terbuka melalui praktek akreditasi dan penegakan hukum.
- Pemberian bantuan kepada pelajar ditargetkan pada semua tingkat pendidikan dan penyediaan pendanaan publik serta infrastruktur yang memadai yang dibutuhkan dalam reformasi pendidikan.
- Merombak sistem pendidikan melalui penyesuaian kebijakan dan melakukan reformasi pendidikan di kedua akses pendidikan formal maupun informal. Di samping itu juga meningkatkan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat untuk memperbaiki akses pendidikan yang lebih baik bagi semua pelajar.
- Meminimalisir korupsi dan politisasi reformasi pendidikan. Hal ini harus dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN untuk kemajuan masyarakat dan bentuk tanggung jawab sosial perintah kepada masyarakat.

Pada tingkat mikro¹², tantangan yang dihadapi masing-masing lembaga pendidikan tinggi adalah

11 Teay Shawyun, “Landscape of HEI and Quality Challenges in AEC 2015”, dalam *International Journal of Business and Management* Vol. II (2), 2014

12 *Ibid.*

perlunya melakukan berbagai kegiatan seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, program akademik bersama, pembentukan kampus internasional di ASEAN / ASIA, dan pembuatan program-program yang berbasis bahasa Inggris. Dalam hal ini, pendidikan tinggi dituntut untuk memiliki kriteria internasional dengan tidak mengabaikan nilai-nilai lokal serta memberikan pelayanan sesuai kebutuhan di tingkat lokal.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk membantu reformasi sistem pendidikan serta memperbaiki proses pembelajaran. Seperti yang dilakukan di Thailand dalam membantu meningkatkan kualitas instruksi sekolah menengah. Inisiatif ini dilakukan melalui pembangunan sistem lisensi guru, memperluas *pre-service* dan *in-service training*, memberikan penghargaan kepada kinerja guru yang luar biasa dan meningkatkan kompensasi guru. Demikian pula yang terjadi di Malaysia. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Malaysia mengembangkan sistem standar kualitas, praktik reorientasi pembelajaran terhadap informasi dan pengetahuan serta memberikan pengajaran matematika dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris. Tentu saja hal ini dibarengi dengan peningkatan kualifikasi guru. Reformasi kurikulum juga menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing sektor pendidikan. Dengan reformasi kurikulum juga ditujukan kepada upaya mendorong fleksibilitas dan relevansi pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih siap di ASEAN. Untuk tujuan ini, tentu saja juga diperlukan sumber pendanaan pendidikan yang besar. Namun demikian di ASEAN juga terdapat beberapa negara yang masih kurang dalam memberikan dukungan pendanaan terhadap sektor pendidikan. Seperti misalnya di Myanmar, pengeluaran publik untuk pendidikan kurang dari satu persen dari PDB.

Pendanaan ini jauh lebih rendah dibandingkan tiga persen di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN¹³.

3. Sektor Pendidikan Indonesia dalam Asean Community 2015

Kehadiran AEC tidak hanya akan mempengaruhi sektor perdagangan bebas untuk berbagai barang, tetapi juga akan mempengaruhi sektor tenaga kerja. Dengan AEC, ASEAN akan bersaing secara bebas untuk mengisi sektor tenaga kerja di ASEAN. Untuk negara-negara yang memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang baik, AEC akan menjadi kesempatan untuk memperluas tenaga kerja mereka ke negara-negara ASEAN lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Agustus 2013 menyebutkan bahwa jumlah pekerja Indonesia dengan kualifikasi sekolah dasar (SD) dan di bawahnya berjumlah adalah 52 juta orang (46,93 persen) atau hampir setengah dari jumlah pekerja yang ada di Indonesia. Sedangkan pekerja dengan kualifikasi lulusan SMP berjumlah 20,5 juta orang (18,5 persen). Sementara pekerja dengan kualifikasi lulusan SMA berjumlah 17.840.000 orang (16,1 persen). Di sisi lain pekerja dengan kualifikasi lulusan universitas menduduki jumlah terendah yaitu sebesar 6,83 persen. Sebagai perbandingan, menurut *the Department of Statistics Malaysia* (DOSM) pada tahun 2012, jumlah tenaga kerja Malaysia adalah 13.120.000 orang dengan total 7.320.000 orang (55,79 persen) adalah lulusan sekolah tinggi dan 3,19 juta orang (24,37 persen) sebagai lulusan universitas dan pemegang ijazah diploma. Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, menurut data Bank Dunia pada tahun 2012 memiliki total tenaga kerja sebanyak 3.220.000 orang dengan kualifikasi SMA sebesar 49,9 persen dan tenaga kerja dengan kualifikasi

13 International Labour Organization and Asian Development Bank, *Op. Cit.*, hlm. 58

ulusan universitas dan diploma sebesar 29,4 persen. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir setengah dari tenaga kerja Indonesia (46,93 persen) bekerja pada sektor tenaga kerja berketerampilan rendah. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Singapura dan Malaysia di mana 80 persen dari tenaga kerjanya adalah lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Ini menunjukkan kurangnya kesiapan Indonesia dalam pasar tenaga kerja di ASEAN. Akar masalah dari tingkat kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang rendah terutama disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan yang lebih tinggi karena tingginya biaya pendidikan di Indonesia¹⁴.

Melihat dari permasalahan tersebut di atas, maka hal mendasar yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi AEC pada tahun 2015 adalah untuk meningkatkan orientasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan adalah sebagai berikut¹⁵: *Pertama*, pemerintah harus memprioritaskan, dalam lima tahun ke depan, meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kerjanya yang sebagian besar terdiri dari lulusan SD, untuk ditingkatkan kualifikasinya dimana setidaknya tenaga kerja adalah lulusan sekolah tinggi. Hal ini sangat diperlukan agar pekerja dapat mempertahankan diri dan berkompetisi setelah AEC mulai berlaku. *Kedua*, pemerintah diharapkan untuk memberantas korupsi yang sistemik di sektor pendidikan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pendanaan pendidikan menjadi sumber utama bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pendidikan. *Ketiga*, Indonesia secara bertahap harus

melakukan reformasi kebijakan pendidikan yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan gratis hingga tingkat universitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya penataan ulang anggaran yang efektif dan efisien. *Keempat*, Indonesia secara bertahap harus meningkatkan program beasiswa untuk mahasiswa lokal dan mahasiswa luar negeri, dan meningkatkan jumlah lulusan pasca sarjana. Dengan meningkatnya jumlah pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi melalui reformasi pendidikan, Indonesia akan menjadi pemain yang berpotensi kuat di sektor tenaga kerja regional dan global.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka pelaksanaan AEC pada tahun 2015, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan anggaran pada peningkatan kualifikasi pendidikan pekerja. Termasuk disini adalah memastikan bahwa proporsi dari pekerja yang ada di Indonesia memiliki setidaknya pendidikan sekolah tinggi. Di sisi lain, di bidang anggaran pendidikan, Pemerintah yang secara konstitusional mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBN setiap tahun untuk pendidikan, namun sebagian besar masih terkonsentrasi untuk membayar gaji guru. Peningkatan pemberian beasiswa juga perlu dilakukan di bidang pendidikan dengan meningkatkan peluang beasiswa bagi siswa lokal dan luar negeri. Melalui program beasiswa ini, warga negara Indonesia dapat memperoleh keterampilan lebih dan ada peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang lulus dari universitas. Peningkatan jumlah pekerja Indonesia dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dapat membuat Indonesia menjadi bangsa yang kuat dalam hal pasar tenaga kerja regional dan global¹⁶.

14 Adhe Nuansa Wibisono, "Indonesia Education: Is Indonesia's Workforce Ready for AEC 2015?", diakses dari <http://www.establishmentpost.com/aec-2015-indonesian-education-reform/> pada tanggal 10 Pebruari 2015 pkl. 12.30.

15 *Ibid.*

16 "Education Hampering Indonesia's Preparations for AEC in 2015" diakses dari <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/education-hampering-indonesias-preparations-aec-2015/> pada tanggal 11 Pebruari 2015 pkl 13.00

Lembaga pendidikan juga dituntut dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang ada guna mendukung penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja penyelenggaraan pendidikan yang baik membutuhkan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang professional. Terlepas dari itu semua, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang professional, infrastruktur yang baik merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di ASEAN. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang teknologi informasi serta ketersediaan infrastruktur informasi teknologi menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu kerangka teknologi informasi nasional yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia siap menghadapi pasar global¹⁷.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia di sektor pendidikan menggambarkan bahwa dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja di ASEAN, Indonesia harus melakukan berbagai pembenahan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional. Pembenahan ini tentu saja akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM agar dapat besaing dengan SDM negara ASEAN lainnya dalam pasar kerja di tingkat regional. Terbentuknya komunitas ASEAN 2015, tidak hanya memberikan sejumlah tantangan tetapi juga memberikan peluang bagi Indonesia. Faktor demografi Indonesia yang mengunungkan akan memberikan peluang untuk memanfaatkan pasar tenaga kerja di ASEAN. Hanya saja peluang ini

tidak mudah untuk diambil mengingat besarnya persentase tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan rendah. Oleh karena itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan negara anggota ASEAN lain dalam hal kerjasama pendidikan untuk meningkatkan keahlian SDM Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah telah menandatangani *The Indonesian Qualification Framework (IQF)* pada tahun 2011. IQF menjadi patokan utama dalam klasifikasi kompetensi pendidikan akademik, pendidikan kejuruan dan lulusan pendidikan profesional. Melalui IQF kualitas hasil pembelajaran dapat distandarisasi di seluruh negara. IQF juga memungkinkan kualifikasi yang diakui oleh negara lainnya dan mendukung mobilitas pendidikan lintas batas. Pemerintah juga menyediakan berbagai program beasiswa bagi dosen di lembaga pendidikan tinggi untuk belajar dan / atau untuk melakukan penelitian di luar negeri sejak tahun 2009. Pada akhir 2011 Pemerintah juga mengumumkan skema hibah Kerjasama Internasional yang membantu lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan kebijakan, peraturan, pedoman dan prosedur untuk melakukan kerjasama¹⁸.

Sementara terkait dengan akses ke pendidikan tinggi, di akhir tahun 2012, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah melahirkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Salah satu yang diatur oleh UU Dikti adalah mengenai akses pendidikan. Melalui undang-undang tersebut akses pendidikan tinggi diperluas dengan memperbanyak kuota mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya seperti bantuan sarana

17 "Menghadapi ASEAN Economic Community 2015", diakses dari <http://www.radarcirebon.com/menghadapi-asean-economic-community-2015.html> pada tanggal 11 Pebruari 2015 pkl. 14.00

18 Pingkan Umboh, "Education for the ASEAN Community – The Case of Indonesia", dalam *Journal of ASEAN Studies*, Vol.1, No.1 (2013), pp.83–89

prasarana yang mendukung proses pembelajaran, pendirian berbagai perguruan tinggi baru, serta pembukaan politeknik dan akademi komunitas. Kebijakan lainnya terkait pembukaan akses pendidikan tinggi adalah dengan memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). BOPTN dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Total dana BOPTN untuk tahun 2012 dan 2013 adalah Rp. 2,7 triliun. Selain BOPTN, pemerintah pun melalui Kemdikbud telah menyediakan program BIDIKMISI, program ini adalah bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari golongan keluarga yang tidak mampu¹⁹.

D. Penutup

Dalam sektor pendidikan, banyak negara menghadapi tantangan di bidang pendidikan tinggi. Hal ini menyangkut meningkatnya permintaan untuk akses ke pendidikan tinggi, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi diperlukan untuk mendapatkan pengakuan di tingkat regional maupun internasional. Mengingat komitmen regional untuk membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2015, negara-negara ASEAN dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pendidikan tinggi baik terkait dengan reformasi pendidikan, penyediaan pendanaan public, penyedia infrastruktur pendidikan sampai dengan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar. Di samping itu, pendidikan tinggi di ASEAN juga diharapkan mampu untuk mengadakan kolaborasi di tingkat regional untuk membangun fondasi yang kuat dalam Komunitas ASEAN.

Meskipun Komunitas ASEAN didasarkan pada tiga pilar, pendidikan tampaknya menjadi elemen

penting yang mendukung formasi Komunitas ASEAN. Menurut Piagam ASEAN kerjasama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia akan memberdayakan masyarakat ASEAN dan memperkuat komunitas ASEAN. Penyelenggaraan pendidikan di negara-negara ASEAN dituntut untuk dapat mengembangkan berbagai kemampuan siswa dalam hal inovasi dan kewirausahaan. Di samping itu, untuk realisasi komunitas ASEAN 2015, lembaga pendidikan harus dapat mendorong penggunaan bahasa Inggris dan informasi teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara lembaga pendidikan mendorong penggunaan Sains dan Teknologi dalam kegiatan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Sejumlah tantangan juga dihadapi Indonesia di bidang pendidikan. Tantangan di sektor ini sangat terkait dengan situasi yang berkembang dimana tenaga kerja Indonesia didominasi oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang rendah. Dengan adanya mobilitas tenaga kerja yang bebas di ASEAN, hal ini akan menjadikan tantangan yang besar bagi Indonesia. Peningkatan daya saing tenaga kerja di pasar kerja di tingkat regional perlu dilakukan dengan segera. Sektor pendidikan yang menjadi dasar dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi sektor yang perlu untuk direformasi untuk menghadapi komunitas ASEAN 2015.

Diperlukan keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan dalam komunitas ASEAN 2015. Perluasan akses pendidikan, pendanaan dalam bidang pendidikan serta perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN.

19 "Menjawab Tantangan Pendidikan Tinggi di Indonesia", dikases dari <http://dikti.go.id/blog/2013/01/24/menjawab-tantangan-pendidikan-tinggi-di-indonesia/> pada tanggal 13 Pebruari 2015 pkl. 9.00

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat, ASEAN 5-YEAR WORK PLAN ON EDUCATION (2011–2015), Oktober 2012
- International Labour Organization and Asian Development Bank, “ASEAN community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity”, Bangkok, 2014
- Shawyun, Teay, “Landscape of HEI and Quality Challenges in AEC 2015”, dalam *International Journal of Business and Management* Vol. II (2), 2014
- Umboh, Pingkan, “Education for the ASEAN Community – The Case of Indonesia”, dalam *Journal of ASEAN Studies*, Vol.1, No.1 (2013), pp.83–89
- Vutha, Hing, “Cambodia’s Preparedness for ASEAN Economic Community 2015 and Beyond”, dalam *Development Research Forum Synthesis Report* No.07, September 2014
- ASEAN Secretariat, “ASEAN Integration by 2015 and Its Implications to Education in the Region”, diakses dari http://seamolec.org/cnx/03/A_ASEAN/28Jan13_ASEC_ASEAN%20Integration%20and%20implication%20to%20Southeast%20Asia.pdf pada tanggal 10 Pebruari 2015 pkl. 13.00
- Nguyen, Nancy Huyen, “THAI WORKFORCE- READY FOR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015?”, diakses dari http://utcc2.utcc.ac.th/utccijbe/_uploads/InProcess/201409/THAI%20WORKFORCE-%20READY%20FOR%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf pada tanggal 11 Pebruari 2015 pkl. 11.00
- Nuansa Wibisono, Adhe, “Indonesia Education: Is Indonesia’s Workforce Ready for AEC 2015?”, diakses dari <http://www.establishmentpost.com/aec-2015-indonesian-education-reform/> pada tanggal 10 Pebruari 2015 pkl. 12.30.
- T. Sadsad, Gilbert, “ENHANCING QUALITY EDUCATION THRU THE K+12 PROGRAM TOWARDS THE REALIZATION OF ASEAN COMMUNITY 2015 THE PHILIPPINES COUNTRY REPORT” diakses dari <http://www.ppsta.net/forms/2014/others/PHILIPPINES%20COUNTRY%20REPORT.pdf> pada tanggal 10 Pebruari 2015 pkl. 15.20.
- Yaakub, Mohammad Naim, “CHALLENGES IN EDUCATION TOWARDS THE REALIZATION OF ASEAN COMMUNITY 2015” diakses dari <http://www.site.rmutt.ac.th/cpscworkshop/materials/sp.pdf> pada tanggal 10 Pebruari 2015 pkl. 09.00
- “Education Hampering Indonesia’s Preparations for AEC in 2015” diakses dari <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/education-hampering-indonesias-preparations-aec-2015/> pada tanggal 11 Pebruari 2015 pkl 13.00
- “Menjawab Tantangan Pendidikan Tinggi di Indonesia”, dikases dari <http://dikti.go.id/blog/2013/01/24/menjawab-tantangan-pendidikan-tinggi-di-indonesia/> pada tanggal 13 Pebruari 2015 pkl. 9.00
- “Menghadapi ASEAN Economic Community 2015”, diakses dari <http://www.radarcirebon.com/menghadapi-asean-economic-community-2015.html> pada tanggal 11 Pebruari 2015 pkl. 14.00
- “Thailand to Focus More on Culture and Education toward Realizing the ASEAN Community”, diakses dari http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=5547&a=3 pada tanggal 10 Pebruari 2015 pkl 15.00